



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HASAN DARAJAT PANGUDI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **725924**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.480.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/160 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/160 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 275.000.000
3. Tanah Seluas 2008 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 280.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m2/280 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 2665 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 89.500.000

1. MOTOR, HONDA NF 125 TD Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOBIL, TOYOTA TOYOTA KIJANG GRAND LONG DIESEL LF82 Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 11.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.200.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.583.700.000



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.583.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

- Nama : LISA PUSPITASARI
- Jabatan : KEPALA BIDANG
- NHK : 763823

II. DATA HARTA

| | | |
|--|-----|-------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 820.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 426 m2/400 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000 | | |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 426 m2/400 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 60.000.000 |
| 1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 7.800.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 2.502.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | 2.502.000 |
| Sub Total | Rp. | 892.804.000 |

III. HUTANG Rp. 88.000.000

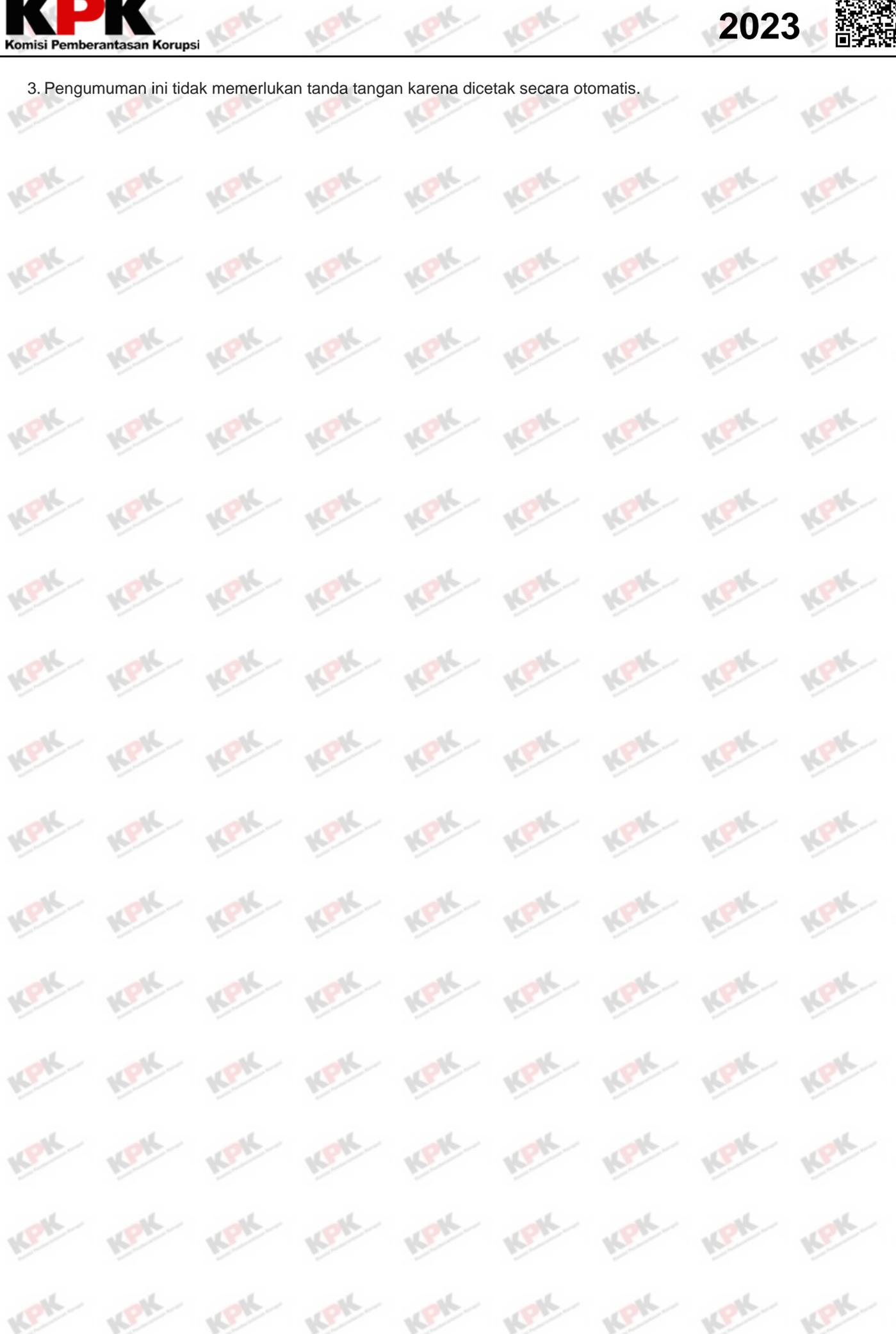
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 804.804.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

- Nama : ANDINA DIAH RAHAYU
- Jabatan : KEPALA BIDANG
- NHK : 742659

II. DATA HARTA

| | | |
|---|-----|--------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | ---- |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 5.000.000 |
| 1. MOTOR, HONDA NF125 TRF Tahun 2009, HASIL SENDIRI | Rp. | 5.000.000 |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | ---- |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 19.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 24.000.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 179.233.965 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | -155.233.965 |

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

- Nama : WUR ADI REJEKI
- Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
- NHK : 773676

II. DATA HARTA

| | | |
|---|-----|-------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 315.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/45 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 1.000.000 |
| 1. MOTOR, YAMAHA MIO AT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 1.500.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 3.063.759 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 320.563.759 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 320.563.759 |

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIYATI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 766038

II. DATA HARTA

| | | |
|--|-----|-------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 100.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/190 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 100.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 10.000.000 |
| 1. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | ---- |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 5.250.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 115.250.000 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 115.250.000 |

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADI PITOKO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 477461

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.105.000.000

- Tanah Seluas 148 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/64 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/112 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 8.000.000

- MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.114.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.114.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GOTRI WIJIANTO WURIATMOJO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 415842

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.710.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/110 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 2220 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 1950 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 360.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 349 m2/70 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/96 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 213.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT USV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, YAMAHA X-RIDE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, SUZUKI JIMNY SPR 1.0 H TOP Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 2.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 204.173.279

F. HARTA LAINNYA

Rp. 19.000.000

Sub Total

Rp. 2.148.173.279



III. HUTANG

Rp. 208.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.939.673.279

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.